

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdurrahman.(1976).*Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung : Alumni.
- Abidin, A. Z. (1983).*Bunga Rampai Hukum Pidana*.Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ali, Z.(2007).*Hukum Pidana Islam*.Jakarta :Sinar Grafikan.
- Ancel, M. (2005).*A Modern Approach to Criminal Problems*.
- Arief, B. N.(1998). *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*.Bandung :Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N.(2002).*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2005). *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : PT. Kencana Media Group.
- Arief, B. N.(2008).*Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Arief, B. N. (2012). *Pedoman/Aturan Pidana Umum KUHP Bulgaria*.Handout.
- Arief, B. N. (2012). *Pedoman/Aturan Pidana Umum KUHP Norwegia*.Handout.
- Arief, B. N. (2012). *Pola Minimal Pidana*.Handout.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional.(1995/1996).*Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*.Departemen Kehakiman RI.
- Bassiouni, M. C. (2008). *Substantive Criminal Law*.Jakarta : Kencana.
- Hamzah, A. (2005).*Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*.Jakarta : Sinar Grafika.
- Koentjaraningrat.(1991). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta:Gramedia.

- Laila, E. (2010). *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*. Jakarta : Solusi Publishing.
- Loqman, L. (2002). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Datacom.
- Marmis, F.(1994).*Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Moeljatno.(1964). *Atas Dasar atau Asas-Asas Hendaknya Hukum Pidana Kita Dibangun*. Surabaya : Konggres Persahi II
- Muladi.(2002). *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi dan Arief, B. N.(1998).*Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*.Bandung : Alumni.
- Mulder, A. (2008). “*Strafrechtspolitiek*” *Delikt en Delinkwent*.
- Prakoso, D. dan Nurwachid.(1983). *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*.Jakarta : Ghalia.
- Putra Jaya, N. S. (2008). *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*.Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M.(1993).*Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.Jakarta :Pidato Pengukuhan Penerimaan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Reksodiputro, M. (1994).*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*.Jakarta : Universitas Indonesia.
- Rosyada, D.(1992).*Hukum Islam dan Pranata Sosial*.Jakarta :Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan.
- Soemitro, R. H. (1982).*Metodologi Penelitian Hukum*.Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjowito, P. (1993). *Kebijakan Legislatif Sebagai Kebijakan Strategi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*. Semarang : Majalah Pranata, Universitas Soegijopranoto.
- Sudarto.(1981). *Hukum dan Hukum Pidana*.Bandung : Alumni.
- Sudarto.(1981).*Kapita Selekta Hukum Pidana*.Bandung : Alumni.
- Sudarto.(1983).*Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*.Bandung: Sinar Baru.

Vos, H. B. (1950). *Loerboek Van Nedekands Strafrecht*. Harlen : HD Tjeek Willink.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 Tentang Panas Bumi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Jurnal /Artikel Ilmiah :

Document, “Fifth United Nation Conggres on *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, Report on Agende Item 9, Jenewa-Austria, 1-12 September 1975”

Rancangan KUHP Republik Indonesia.

Internet

www. hukumonline.com

www.jurnalhukum.com

fh.undip.ac.id

<https://jdhin.bphn.go.id>